

Implementasi SIKN dan JIKN di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat

ABSTRACT

This study examines the implementation of the National Archival Information System (SIKN) and the National Archival Information Network (JIKN) at the Archives and Library Office of West Bandung Regency. The main focus of this research is to analyze the benefits and challenges of the system's implementation, as well as its impact on public access to information, transparency, and accountability of regional government. The research methods include interviews with archivists, network node administrators, and division heads, along with direct observation. The findings indicate that SIKN and JIKN play a significant role in supporting archive digitization and modernizing archival management, improving the efficiency of archive administration, and expanding public access to information. Furthermore, the system strengthens the practice of good governance by enhancing transparency and accountability in regional government administration. However, challenges such as limited human resources, technical issues with network and system stability, and incomplete archival metadata remain. The study concludes that optimizing the implementation of SIKN and JIKN requires improving human resource capacity, strengthening technological infrastructure, and enhancing the quality of archival data to ensure the system's sustainability and effectiveness.

Keyword: SIKN, JIKN, Archive Digitization, Good Governance.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat. Fokus utama kajian adalah manfaat dan kendala dalam implementasi sistem tersebut serta dampaknya terhadap akses informasi publik, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan meliputi wawancara dengan arsiparis, admin simpul jaringan, dan kepala bidang, serta observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIKN dan JIKN memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung digitalisasi arsip dan modernisasi pengelolaan kearsipan, meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip, serta memperluas akses informasi bagi masyarakat. Sistem ini juga berperan dalam memperkuat praktik good governance melalui transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, masalah teknis jaringan dan sistem, serta kurangnya kelengkapan metadata arsip. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi penerapan SIKN dan JIKN memerlukan peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur teknologi, dan pemenuhan kualitas data arsip untuk mendukung keberlanjutan sistem secara efektif dan inklusif.

Kata Kunci: SIKN, JIKN, Digitalisasi Arsip, Good Governance.

PENDAHULUAN

Arsip merupakan elemen krusial bagi kehidupan organisasi, lembaga, maupun masyarakat. Arsip berperan sebagai memori kolektif bangsa yang berfungsi sebagai rekaman kegiatan yang telah terjadi, serta sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, oleh karena itu pengelolaan arsip merupakan hal penting bagi pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam rangka pelestarian informasi yang memiliki nilai bersejarah. Sebagaimana disebutkan oleh Sari & Putra (2024), “Keberadaan arsip sebagai sumber informasi memainkan peranan yang sangat penting dalam evaluasi peristiwa yang telah terjadi di masa lalu, pertimbangan dalam pengambilan keputusan saat ini, serta dalam memprediksi kemungkinan yang akan terjadi di masa depan.” (hlm. 2).

Adelia dan Putra (2024) menyebutkan bahwa “sebagai hasil dari informasi administrasi dan manajemen, arsip terus bertambah dan berkembang, yang pada akhirnya menyebabkan penumpukan arsip yang tidak terkendali. Oleh karena itu, pengelolaan arsip menjadi sangat penting.” (hlm. 1). Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka pengelolaan arsip juga harus bersifat adaptif terhadap transformasi digital. Dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi yang signifikan, arsip tidak harus bersifat konvensional semata, melainkan harus mampu beradaptasi dengan teknologi yang berkembang. “Arsip-arsip kuno yang memiliki nilai guna informasi sejarah dan mengandung keunikan yang sangat menarik sekarang telah disajikan dan diakses melalui media elektronik. Dengan memungkinkan pengaksesan yang lebih luas, diharapkan arsip merupakan barang bukti yang sekaligus mampu berbicara tentang fakta dan peristiwa sejarah dan mampu memberikan arti dan manfaat dalam kehidupan manusia.” (Mulyadi, 2023). Arsip digital dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akan akses informasi yang lebih efisien serta untuk memastikan pemerataan distribusi informasi kepada publik. Sebagai rekaman resmi dari aktivitas atau peristiwa, arsip saat ini tersedia dalam berbagai format dan media penyimpanan yang memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi. (Fad’li et al., 2023, hlm. 2).

Arsip digital juga memiliki peranan yang vital dalam mendukung penerapan *smart governance* karena dapat meningkatkan efisiensi, transparansi dalam pengelolaan pemerintahan. Sebagaimana disebutkan oleh Wardani dan Putra (2024) “Arsip sebagai bukti administratif, arsip

menyimpan informasi yang dapat digunakan untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan legalitas setiap keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah.” (hlm. 2) Patmawati & Ismaya (2024) menyatakan bahwa Proses digitalisasi arsip dan pengelolaan arsip elektronik menjadi sangat penting di era Revolusi Industri 4.0, karena memungkinkan akses informasi dari lokasi yang jauh serta menyediakan metode pencarian yang lebih efektif. Digitalisasi dianggap sebagai pendekatan yang relevan untuk melestarikan arsip, dengan cara yang lebih modern dan mampu melindunginya dari ancaman kepunahan. “Berkaitan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan akses informasi yang lebih cepat, arsip digital menjadi salah satu jenis arsip yang sebenarnya memiliki arti atau esensi yang hampir sama dengan arsip tekstual.” (Sari & Putranto, 2022).

Untuk menjawab kebutuhan aksesibilitas dan efisiensi arsip pada sektor pemerintahan dan masyarakat, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengembangkan dua sistem berbasis website yaitu Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN), alat bantu pengelolaan dan integrasi data arsip secara nasional, dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) sebagai media publikasi informasi arsip kepada masyarakat. Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) merupakan aplikasi yang digunakan oleh simpul jaringan untuk mengintegrasikan dan menghimpun data serta informasi kearsipan. Adapun Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) berfungsi sebagai website antarmuka publik yang menyediakan akses bagi masyarakat terhadap informasi kearsipan nasional yang telah dihimpun melalui SIKN. (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2021) Keduanya saling terhubung dan berfungsi mendukung transformasi kearsipan yang adaptif dan transparan.

Pada tingkat daerah, khususnya di Dinas Arsip dan Perpustakaan, implementasi SIKN dan JIKN diharapkan membawa perubahan signifikan dalam mendukung program digitalisasi arsip. Dengan memanfaatkan kedua sistem ini, pengelolaan arsip menjadi lebih efisien, aman, dan sekaligus memberikan kemudahan akses yang lebih luas bagi masyarakat. Melalui penerapan sistem ini, arsip dapat dikelola dengan lebih efisien dan optimal, terutama dalam hal keterbukaan informasi yang dapat diakses publik. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana penerapan SIKN dan JIKN di lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan dapat menjadi mendukung dalam menciptakan layanan kearsipan digital yang lebih maksimal.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis untuk memahami implementasi SIKN dan JIKN di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat adalah pendekatan dengan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif diartikan sebagai informasi yang disampaikan melalui kata, kalimat, ungkapan, narasi, dan gambar (Ramdhan, 2021). Abdussamad (2021) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk narasi tertulis maupun lisan dari individu serta perilaku yang diamati. Pendekatan ini dilakukan secara menyeluruh terhadap konteks dan subjek yang diteliti.

Metode ini memungkinkan penulis untuk dapat mendalami penerapan SIKN dan JIKN di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat secara sistematis dan terstruktur. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur terhadap peraturan yang berlaku di Kabupaten Bandung Barat terkait kearsipan. Tujuan dari studi literatur ini adalah untuk memahami dasar hukum, pedoman teknis, serta kerangka kebijakan yang menjadi landasan implementasi sistem digitalisasi arsip di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat.

Kemudian dilakukan pula observasi langsung terhadap praktik implementasi SIKN dan JIKN, observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai bagaimana sistem kearsipan digital dijalankan dalam praktik sehari-hari oleh para pengelola SIKN dan JIKN.

Selain observasi, metode wawancara juga digunakan untuk menggali informasi secara lebih dalam. Wawancara dilakukan secara langsung dengan arsiparis sebagai pengelola SIKN dan JIKN serta kepala bidang Arsip di Dinas Arsip dan Perpustakaan untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait sistem yang digunakan, manfaat yang dirasakan, kendala yang dihadapi, serta strategi yang digunakan untuk mengatasi tantangan dalam penerapan sistem.

Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memberikan gambaran hasil penelitian yang jelas dan mudah dipahami dalam temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arsip merupakan memori kolektif bangsa, hal ini berarti arsip memiliki peran vital dalam pelestarian informasi yang memiliki nilai historis, dan bernilai penting bagi organisasi maupun perseorangan. "Arsip adalah kumpulan dokumen yang disimpan secara sistematis agar di masa mendatang menjadi bukti dan penyelamat dan disimpan dengan baik agar mudah ditemukan bila diperlukan" (Halimah, 2020). Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa "Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara." International Council on Archives (ICA) menyebutkan bahwa "*recorded information produced or received in the initiation, conduct or completion of an institutional or individual activity and that comprise content, context and structure sufficient to provide evidence of the activity*". Arsip adalah informasi terekam yang dibuat atau diterima dalam rangka perencanaan, pengendalian, pelaksanaan atau penyelesaian kegiatan kelembagaan atau perorangan dan terdiri atas isi, konteks, dan struktur untuk dapat menjadi bukti dari kegiatan (ANRI, 2015). Arsip memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Fad'li, et al., (2023).

Arsip memiliki peran yang penting bagi masyarakat umum maupun lembaga daerah seperti pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat Syarif dan Nurdiansyah (2025) menyebutkan bahwa kepedulian masyarakat Indonesia terhadap arsip masih rendah jika dibandingkan dengan negara maju, yang umumnya sangat menjaga keberlangsungan dokumen. Hal ini terlihat dari kebiasaan masyarakat yang baru mencari arsip saat dibutuhkan atau bahkan kehilangan arsip saat terjadi bencana. Maka dari itu penataan dokumen dan informasi secara digital berperan penting dalam menyediakan sarana pendukung bisnis yang menunjang efektivitas kerja dan pelayanan (Juniati & Nurdiansyah, 2023).

"Arsip merupakan sarana administratif utama untuk perencanaan dan perkembangan suatu organisasi. Karena arsip merupakan sumber data dan informasi bagi organisasi baik swasta maupun pemerintahan, arsip akan

berperan dinamik dalam organisasi bilamana para administrator menganggap penting dan perlu melaksanakan kegiatan kearsipan secara baik.” (hlm.2) Menurut Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo (2022), arsip menjadi perekam dan alat bukti kinerja pemerintahan, sehingga menjadi kebutuhan strategis yang sangat penting bagi kepentingan negara untuk mendorong instansi pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan perlindungan hak-hak keperdataan rakyat.

Sejalan dengan perkembangan zaman arsip kini tidak hanya disimpan dalam media konvensional berupa kertas tetapi juga terdapat media-media baru sesuai dengan perkembangan teknologi. Contohnya adalah antara lain surat elektronik (*e-mail*), CD (*compact disk*), penyimpanan arsip berbasis *cloud computing* (penyimpanan awan), gambar berbentuk format .jpg atau .png, video dalam bentuk digital .mp4, dan lain sebagainya. Menurut Muhidin, Winata, & Santoso, (2016) Arsip digital adalah arsip yang dapat disimpan dan ditransmisikan dalam bentuk terputus-putus, atau dalam bentuk kode-kode biner yang dapat dibuka, dibuat atau dihapus dengan alat komputasi yang dapat membaca atau mengolah data dalam bentuk biner, sehingga arsip dapat digunakan atau dimanfaatkan. (hlm. 2).

Arsip yang dibuat dan disimpan dalam format elektronik memberikan kemudahan akses dan pencarian terhadap sumber informasi serta dokumen penting yang telah diorganisasikan secara terstruktur. Hal ini sangat membantu dalam memperlancar pelaksanaan berbagai proses administrasi dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data serta mempercepat respon terhadap kebutuhan informasi. (Musliichah, 2019, hlm. 12) Pengelolaan arsip secara digital atau elektronik juga telah diatur dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik.

Digitalisasi arsip hadir untuk menjawab tantangan publik di era perkembangan teknologi yang pesat, dimana pemerintah diharapkan untuk memberikan aksesibilitas terhadap keterbukaan informasi publik secara merata. Menurut Azahra dan Putra (2023) “Digitalisasi arsip adalah proses mengubah dokumen fisik menjadi format digital yang disimpan dalam perangkat elektronik seperti komputer.” (hlm. 8). Penerapan digitalisasi arsip pada sektor pemerintahan dapat menjadi solusi strategis dalam mewujudkan pengelolaan arsip yang lebih tersusun secara sistematis, efisien, dan mudah diakses.

Bagi masyarakat, digitalisasi arsip memungkinkan kemudahan dalam memperoleh informasi yang sebelumnya sulit diakses, hal tersebut selaras dengan isi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa “Setiap Orang berhak: a. melihat dan mengetahui Informasi Publik; b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Melalui platform daring seperti Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), publik dapat mendapatkan hak untuk mengakses informasi publik dan menjangkau berbagai dokumen arsip secara mandiri, tanpa keterbatasan waktu dan lokasi.

Dengan demikian, digitalisasi arsip tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat sebagai lembaga kearsipan daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku, sejalan dengan apa yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa “Penyelenggaraan kearsipan kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota.” dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2019 “Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Arsip Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab masing-masing pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan Daerah.” Hal tersebut memperkuat pernyataan bahwa Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat sebagai Lembaga Kearsipan Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan penyelenggaraan kearsipan tingkat kabupaten, termasuk dengan pengelolaan arsip digital. Pernyataan tersebut selaras didukung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia yang menginstruksikan pengelolaan kearsipan dengan cara yang baru dengan memanfaatkan teknologi digital, tinggalkan pengelolaan yang lama yang tidak efisien, akses yang lambat dan penyimpanan yang tersebar dimana-mana (Arsip Nasional, 2021).

Untuk menjawab tantangan dan kebutuhan publik terhadap pengelolaan arsip digital yang memiliki akses informasi yang luas maka SIKN dan JIKN

hadir untuk membentuk pengelolaan arsip yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi antara pusat dan daerah dalam rangka memperkuat sistem informasi nasional. Menurut Zikri (2024) “Seiring perkembangan zaman dan tuntutan teknologi, saat ini kebanyakan dinas perpustakaan dan kearsipan di Indonesia telah memiliki Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) sebagai sarana temu balik informasi. Tujuan pelayanan sistem online ini adalah untuk membantu para pengguna secara melembaga, mengenali atau menelusuri sumber-sumber informasi dalam menghadapi ledakan informasi.” (hlm. 12).

Secara hukum, keberadaan SIKN diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, khususnya pada Pasal 47 ayat (1), yang menyatakan bahwa dalam rangka pengelolaan arsip secara nasional dibentuk Sistem Informasi Kearsipan Nasional. Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dirancang untuk mengelola arsip statis dan terhubung dengan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) sebagai platform publikasi daring. Melalui sistem ini, masyarakat di seluruh Indonesia dapat mengakses dan menelusuri arsip digital secara lebih mudah dan terpusat. (Kurniawan et al., 2024).

Lolytasari dan Dirsanala (2023) menyatakan bahwa sistem SIKN dan JIKN dikembangkan dengan mengacu pada prinsip kerja aplikasi AtoM, yaitu sebuah platform terbuka berbasis web yang dirancang untuk memberikan akses dan deskripsi arsip sesuai standar internasional, termasuk dalam konteks multibahasa dan berbagai repositori. Melalui integrasi ini, informasi arsip yang dikelola oleh SIKN dapat dijangkau publik secara luas melalui laman JIKN, SIKN berperan sebagai platform untuk pengelolaan arsip yang dinamis atau statis, memungkinkan instansi pemerintah untuk melakukan pencatatan, penyimpanan, dan pengolahan data arsip secara digital. Melalui SIKN, proses pengarsipan menjadi lebih terstruktur dan sistematis, sehingga meningkatkan efisiensi administrasi serta mempermudah pengelolaan arsip yang tersebar di berbagai lembaga. Sementara, JIKN berperan sebagai jaringan informasi yang menyediakan akses publik terhadap arsip digital. Melalui JIKN, masyarakat umum dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi arsip yang telah dipublikasi oleh lembaga, sehingga mendukung prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan informasi publik. JIKN juga memiliki peran penting dalam konteks negara kesatuan, yakni sebagai sarana bantu

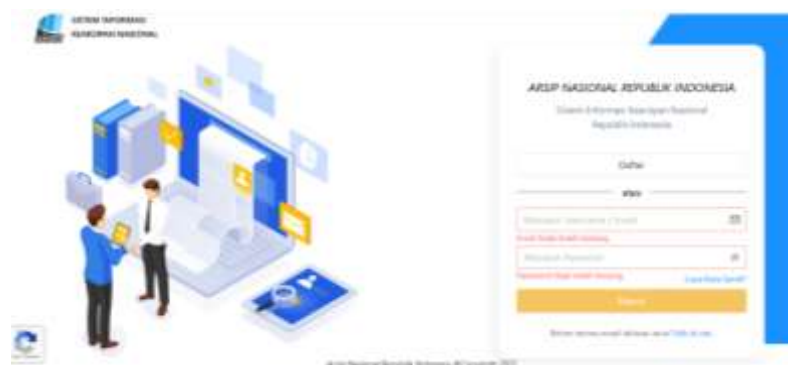
penyatuan riwayat dokumenter yang terpisah-pisah atau terpecah-pecah (*fragmented documentary history*) di antara para penyelenggara kearsipan seluruh Indonesia. (ANRI, 2021) “Jaringan Informasi Kearsipan Nasional disingkat JIKN dan Sistem Informasi Kearsipan Nasional disingkat SIKN merupakan program prioritas pemerintah berskala nasional yang bertujuan menyediakan fasilitas untuk masyarakat berupa informasi arsip berbasis web (web-based electronic archive).” (Herdianto et al., 2022, hlm. 1).

Arsip yang diinputkan ke dalam SIKN dan dipublikasikan pada JIKN adalah arsip yang memiliki sifat statis. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.) Menurut Fadilah dan Putra (2024) “Arsip statis tidak lagi digunakan untuk pengelolaan organisasi penciptanya, tetapi dapat dimanfaatkan oleh pengguna dan generasi mendatang untuk tujuan pendidikan dan penelitian.” (hlm. 238). Arsip statis yang memiliki nilai historis dan mengandung isi informasi yang penting belum banyak diakses oleh publik dikarenakan keterbatasan informasi yang ada, maka dari itu, perlu pengelolaan arsip statis secara optimal, sehingga seluruh masyarakat atau pengguna dapat memahami pengelolaan arsip statis (Kurniawan et al., 2024). Arsip-arsip yang telah diinput melalui website SIKN dapat ditelusuri masyarakat dan publik secara luas melalui website JIKN (<https://jkn.anri.go.id/>) yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja tanpa ada persyaratan khusus untuk mendapatkan informasi.

Untuk menjadi simpul jaringan resmi terdapat beberapa syarat sesuai yang tertera pada situs resmi ANRI. Terdapat persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Persyaratan administratif, meliputi; menyerahkan surat komitmen untuk menjadi simpul jaringan JIKN yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat setingkat Eselon II, mengisi formulir kelengkapan data kepada ANRI sesuai dengan format yang telah ditetapkan; dan menerima surat persetujuan dari ANRI yang ditandatangani oleh deputi yang membidangi penyelenggaraan SIKN dan JIKN. Sedangkan persyaratan teknis meliputi; memiliki informasi kearsipan yang bersifat terbuka untuk diakses publik melalui Portal JIKN Publik, ataupun informasi kearsipan lainnya yang bersifat terbuka untuk diakses secara terbatas oleh pengguna di lingkungan pemerintah melalui Portal JIKN

Intra-Pemerintah, memiliki sumber daya manusia untuk memuat informasi kearsipan ke dalam sistem; dan memiliki sumber daya teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung integrasi informasi kearsipan dikelolanya dengan Portal JIKN.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat telah menjadi simpul jaringan resmi sejak tahun 2019 dengan kode unik simpul jaringan 23217-5. Berikut adalah tampilan ketika arsiparis atau pengelola arsip menginputkan arsip melalui website SIKN (sikn.anri.go.id)



Gambar 1. Website SIKN
Sumber: ANRI, 2025

Tampilan login ke dalam website SIKN hanya dapat diakses oleh arsiparis atau pengelola SIKN di Dinas Arsip dan Perpustakaan. Nama pengguna dan kata sandi bersifat terbatas, sehingga tidak sembarang orang dapat mengakses SIKN dalam simpul jaringan Kabupaten Bandung Barat.



Gambar 2. Dashboard website SIKN
Sumber: ANRI, 2025

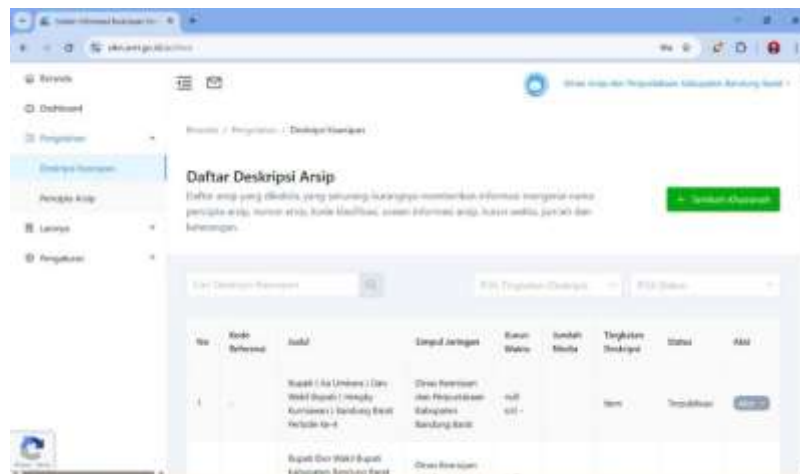
Tampilan dashboard admin simpul jaringan. Terdapat menu jumlah arsip yang telah diinput, jumlah objek digital, serta rincian tampilan terkait

berapa arsip beserta jenisnya yang sudah diunggah maupun sudah masuk ke dalam *draft*.



Gambar 3. Admin simpul jaringan website SIKN
Sumber: ANRI, 2025

Tampilan admin simpul jaringan ketika menginput arsip ke dalam sistem SIKN.



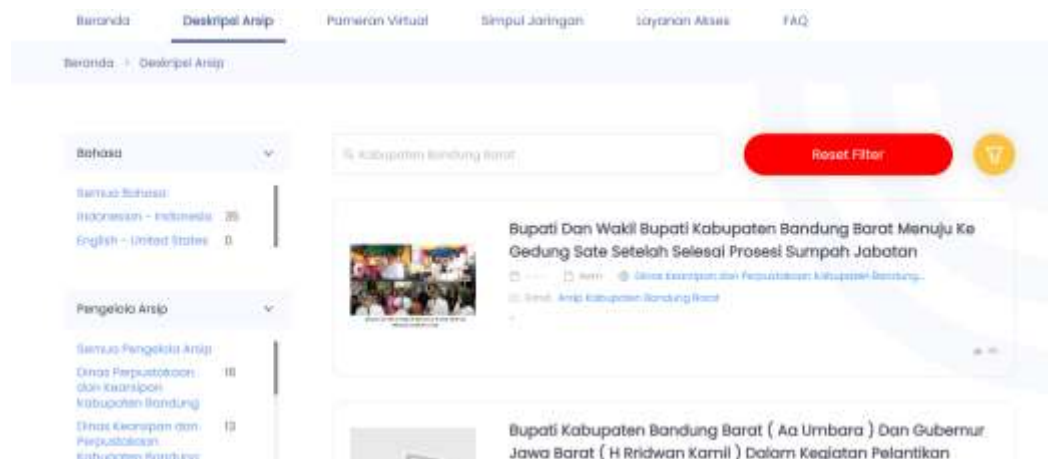
Gambar 4. Deskripsi kearsipan website SIKN
Sumber: ANRI, 2025

Contoh data deskripsi arsip yang sudah diinput pada web SIKN.

Masyarakat dapat mengakses informasi arsip Kabupaten Bandung Barat melalui website JIKN, berikut adalah tahapannya.



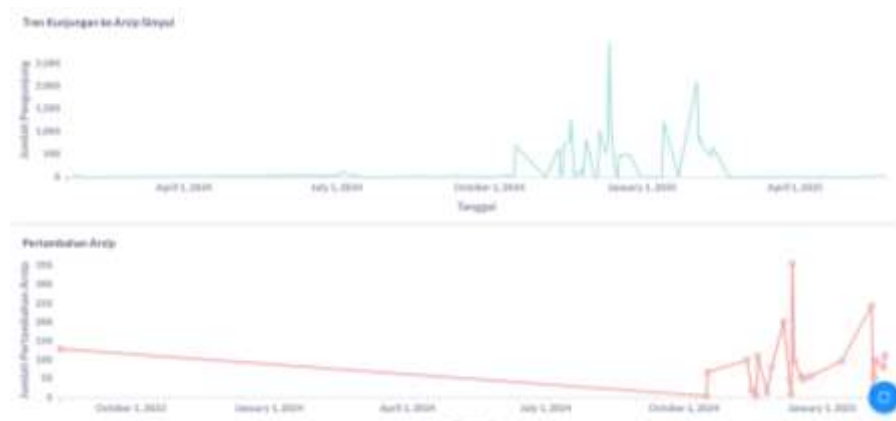
Gambar 5. Laman utama Website JIKN
Sumber: ANRI, 2025



Gambar 6. Arsip-arsip Kabupaten Lampung Barat
Sumber: ANRI, 2025

Pada laman utama website JIKN tuliskan “Kabupaten Bandung Barat” maka akan muncul arsip-arsip yang telah diinput dan dipublikasikan oleh admin simpul jaringan Kabupaten Bandung Barat. Tersedia beberapa format arsip yang dapat diakses antara lain adalah arsip tekstual berformat .pdf dan arsip foto yang memiliki format .jpeg, .jpg, maupun .png. Arsip yang telah diunggah dapat diakses secara online, setiap informasi yang terdapat pada JIKN dapat dijadikan bahan penelitian, pembelajaran, bahan pembuktian yang akurat, bahan ajar maupun bahan penulisan.

Hingga Mei 2025 terdapat 1.317 arsip yang telah terpublikasi pada JIKN, 1.838 objek digital, 2.069 draf dan 109 kunjungan ke simpul jaringan JIKN Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat.



Gambar 7. Grafik tren kunjungan dan pertambahan arsip
Sumber: ANRI, 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan arsiparis, admin simpul jaringan, serta kepala bidang di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat, ditambah dengan observasi langsung, penerapan SIKN dan JIKN membawa sejumlah manfaat signifikan sekaligus menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya.

Dari sisi manfaat, keberadaan SIKN dan JIKN menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung proses digitalisasi arsip. Sistem ini memungkinkan penciptaan, pengelolaan, dan penyebarluasan arsip secara lebih efisien melalui satu mekanisme terintegrasi yang bersifat nasional. SIKN dan JIKN juga berfungsi sebagai homebase integrasi data arsip dan pusat sentralisasi penyimpanan arsip digital, sehingga mempermudah pelacakan dan akses terhadap informasi arsip atau sebagai *finding aids* arsip statis. Penerapan sistem ini turut meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya, terutama dalam proses pencarian dan pemanfaatan arsip. Selain itu, SIKN dan JIKN memberikan akses terbuka bagi masyarakat untuk memperoleh informasi kearsipan, yang berdampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses arsip-arsip yang telah diunggah ke dalam JIKN, sehingga mendukung terciptanya pemerintahan yang terbuka dan partisipatif. Tidak kalah penting, sistem ini juga berperan dalam pelestarian arsip digital jangka panjang, menjaga agar informasi penting tetap dapat diakses meskipun media aslinya telah rusak atau tidak lagi dapat digunakan. Hal tersebut sesuai dengan salah satu tugas dalam pengelolaan arsip elektronik adalah pemeliharaan arsip, yang dilakukan oleh pihak manajemen lembaga arsip untuk memastikan

ketersediaan arsip dalam jangka waktu panjang dan penggunaannya yang efektif serta efisien. (Nurdiansyah, et al., hlm.189)

Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat dalam implementasi SIKN dan JIKN. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan arsip digital dan pengoperasian sistem. Untuk saat ini pengelola SIKN dan JIKN di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat terdiri dari tiga orang, yaitu satu arsiparis terampil dan dua tenaga honorer, sedangkan arsip yang perlu diunggah ke sistem JIKN tergolong cukup banyak dan memerlukan waktu lama apabila hanya ditangani oleh tiga orang admin simpul jaringan. Menurut Miharja dan Putra (2024) “Keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan arsip sering kali menjadi hambatan utama.” (hlm.2). Hal tersebut juga merupakan salah satu kendala yang ada pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, masalah teknis seperti jaringan internet yang tidak stabil serta sering terjadinya gangguan (down) pada situs SIKN dan JIKN menjadi hambatan dalam proses unggah dan akses arsip secara daring. Beberapa kali pernah terjadi maintenance atau perbaikan pada server SIKN dan JIKN hingga memakan waktu berminggu-minggu, hal tersebut merupakan kendala yang sulit untuk ditangani karena server SIKN maupun JIKN berada di pusat, sehingga apabila server pusat mengalami gangguan maka seluruh simpul jaringan baik kota/kabupaten, provinsi, perguruan tinggi, BUMD dan lain-lain akan terdampak secara serentak.

Kendala lainnya adalah terbatasnya jumlah bahan arsip yang tersedia untuk diunggah, sehingga belum mencerminkan keseluruhan arsip yang dimiliki oleh instansi. Kabupaten Bandung Barat berdiri pada, selama Kabupaten berdiri hingga sekarang, arsip-arsip yang bersifat vital atau statis perlu ditelusuri keberadaannya sehingga masyarakat luas dapat mengakses data terkait Kabupaten Bandung Barat apabila dibutuhkan. Beberapa arsip yang telah diunggah pun masih belum dilengkapi dengan *metadata* yang memadai, seperti informasi tahun, jenis kegiatan, atau keterangan kontekstual lainnya, yang menyebabkan informasi tersebut kurang optimal dalam layanan akses dan temu balik arsip.

Dengan demikian, meskipun penerapan SIKN dan JIKN telah memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan arsip di daerah, masih diperlukan upaya peningkatan dari berbagai aspek, seperti penguatan kapasitas SDM,

perbaikan infrastruktur teknologi, dan peningkatan kualitas data arsip, agar manfaat dari sistem ini dapat dirasakan secara maksimal dan berkelanjutan.

Penerapan SIKN dan JIKN tidak hanya berdampak pada internal pengelolaan arsip oleh instansi pemerintah, tetapi juga memberikan pengaruh signifikan terhadap masyarakat dan kehidupan sosial secara lebih luas. Sistem ini membuka akses yang lebih luas dan transparan terhadap informasi kearsipan yang sebelumnya sulit dijangkau oleh publik. Dengan diunggahnya arsip-arsip statis ke dalam platform digital yang dapat diakses secara daring, masyarakat memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk mengakses informasi publik secara mandiri. Hal ini sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Arsip yang sebelumnya hanya tersedia secara fisik dan terbatas di ruang arsip kini dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui SIKN dan JIKN, yang turut mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan memahami kebijakan serta kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dari sisi transparansi dan akuntabilitas, kehadiran SIKN dan JIKN memungkinkan masyarakat untuk menelusuri dokumen-dokumen arsip yang berkaitan dengan program, kegiatan, maupun kebijakan pemerintah daerah secara terbuka. Hal ini mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih terbuka, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Arsip yang terdigitalisasi dan tersusun rapi menjadi bukti autentik atas proses administrasi dan pengambilan keputusan publik, sehingga dapat menjadi acuan dalam proses audit sosial maupun pengambilan kebijakan yang berbasis data dan bukti (*evidence-based policy*).

Selain itu, penyediaan arsip digital secara terbuka juga berdampak positif bagi kalangan akademisi, peneliti, pelajar, dan masyarakat umum yang membutuhkan data historis dan administratif untuk kepentingan penelitian maupun kajian sosial. Hal ini memperkuat peran kearsipan dalam mendukung ekosistem pengetahuan dan pembangunan masyarakat yang sadar akan sejarah, informasi, dan hak akses terhadap dokumen negara.

Dengan demikian, penerapan SIKN dan JIKN tidak hanya memperkuat tata kelola kearsipan internal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata

terhadap peningkatan kualitas demokrasi lokal melalui penyediaan akses informasi yang adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat secara signifikan mendukung digitalisasi arsip sebagai bagian integral dari modernisasi pengelolaan arsip pemerintah daerah. Sistem ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan arsip digital yang terintegrasi, memberikan efisiensi dalam pengelolaan, pelestarian, serta penyebarluasan informasi kearsipan secara sistematis dan terstandarisasi.

Penerapan SIKN dan JIKN juga berkontribusi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, yang merupakan elemen kunci dalam praktik *good governance*. Dengan memberikan akses informasi publik yang lebih terbuka dan mudah dijangkau, sistem ini memperkuat mekanisme pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mendukung keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun demikian, keberhasilan implementasi sistem ini masih terkendala oleh faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, ketidakstabilan infrastruktur teknologi, ketidaklengkapan *metadata* arsip, serta keterbatasan bahan arsip yang diunggah. Kondisi ini menuntut adanya upaya peningkatan kapasitas sumber daya, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta pemenuhan kualitas data arsip yang memadai agar potensi manfaat sistem dapat dioptimalkan secara maksimal.

Secara keseluruhan, SIKN dan JIKN merupakan instrumen strategis dalam membangun ekosistem kearsipan digital yang berkelanjutan dan inklusif, sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat melalui penyediaan informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. H., S.I.K., M.Si. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV Syakir Media Press.
- Adelia. Putra, P. (2024, November). Pengelolaan Arsip di Polsek Tanjungpinang Timur. *In Seminar Nasional Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (Vol. 1, pp. 27-40).
- Azahra, M. F., & Putra, P. (2024). Implementasi Arsip Digital dalam Efisiensi Penyimpanan. *Journal of Economic and Management (JEM) Terekam Jejak*, 1(1), 1-13.
- Fadilah, M., & Putra, P. (2024, November). Transformasi Praktik Pengelolaan Arsip Dinamis melalui Aplikasi Srikandi Dinas Perpustakaan dan Arsip Purworejo: Studi Kualitatif Efek Implentasi pada Efisiensi dan Persepsi Pengguna. *In Seminar Nasional Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (Vol. 1, pp. 282-295).
- Fadli, G. A., Marsofiyati, & Suherdi. (2023). Implementasi arsip digital untuk penyimpanan dokumen digital. *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 1(4), 1–9. <https://doi.org/10.61132/manuhara.v1i4.115>
- Halimah, M. (2020). *Administrasi perkantoran*. Universitas Terbuka.
- Herdianto, R. A., Ramli, K., & Suryanto, Y. (2022). Analisis risiko pada layanan arsip elektronik dengan metode Octave Allegro (Studi Kasus: SIKN JIKN). *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*.
- Juniati, J., & Nurdiansyah, A. (2023). Pola pengelolaan arsip secara digital dalam mendukung efektivitas organisasi di dinas pendidikan dan kebudayaan kota bontang. *Ikomik: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Informasi*, 3(1), 28-37.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2022, 19 Mei). Peran arsip ciptakan “good governance”. Diakses dari <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/peran-arsip-ciptakan-good-governance>
- Kurniawan, S. R., Atma Dirgatama, C. H., Kusumawardhani, A., & Ibad, I. (2024). Optimalisasi edukasi pemanfaatan arsip statis melalui Sistem

- Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) di Kota Surakarta. *JURKAMI: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 2-4.
- Lolytasari, L., & Dirsanala, A. (2023). Digitalisasi arsip dalam mendukung pelaksanaan e-government. *Shaut al-Maktabah: Jurnal Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi*, 27.
- Miharja, J. M., & Putra, P. (2024). Pengelolaan Arsip Dinamis pada Sub Bagian Tata Usaha Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II Purwakarta. *Journal of Economic and Management (JEM) Terekam Jejak*, 1(1), 1-12.
- Muhidin, S. A., Winata, H., & Santoso, B. (2016). Pengelolaan arsip digital. *Jurnal Pendidikan Bisnis dan Manajemen*, 2(3), 178–183.
- Mulyadi, S., S.Sos.I., M.Hum. (2023). *Pengelolaan arsip berbasis otomasi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Musliichah, M. (2019). Pendayagunaan arsip untuk mendukung kawasan strategis keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). *Jurnal Kearsipan*, 12(1), 51–68. <https://doi.org/10.46836/jk.v12i1.8>
- Nurdiansyah, A., Valentino, R. A., & Yussuf, S. A. (2025). Preservasi digital sebagai upaya akuntabilitas tata kelola arsip di lembaga kearsipan di Indonesia. *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*, 18(1), 186–208. <https://journal.ugm.ac.id/khazanah/article/view/106468>
- Patmawati, Z., & Ismaya. (2024). Strategi digitalisasi dan pengelolaan arsip elektronik era revolusi industri 4.0 di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul. *Prosiding Seminar Nasional Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2024 Universitas Terbuka*, 2.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2021). *Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) Provinsi Jawa Barat*. <https://sikn.jabarprov.go.id/>
- Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik.
- Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Alih Media Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah. <https://jdih.bandungbaratkab.go.id/produk-hukum/detail/peraturan-bupati-bandung-barat-nomor-11-tahun-2022>
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan. <https://jdih.bandungbaratkab.go.id/produk-hukum/detail/peraturan-daerah-kabupaten-bandung-barat-nomor-5-tahun-2019>
- Putra, P., Purnamayanti, A., & Maryani, E. (2023). Kebutuhan dan peluang implementasi konsep Gallery, Library, Archive, Museum (GLAM) dalam pengelolaan pengetahuan dan konvergensi digital di Universitas Lampung. *ARCHIVIST: Indonesian Journal of Archival*, 1(1), 1–20.

- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Sari, D. P., & Putra, P. (2024). Tantangan digital dalam implementasi manajemen data arsip berbasis elektronik. *Journal of Economic and Management (JEM) Terekam Jejak*, 1(1), 1–8. <https://journal.terekamjejak.com/index.php/jem>
- Sari, I. N., & Putranto, W. A. (2022). *Perlindungan arsip vital dan penanganan arsip pascabencana*. Gadjah Mada University Press.
- Syarif, V. D. P., & Nurdiansyah, A. (2025). Upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta dalam Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Masyarakat Melalui Layanan Arsip Keluarga (Lasiga). *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, 9(1), 1-14.
- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. <https://www.jdih.go.id/pencarian/detail/1325762/undang-undang-nomor-43-tahun-2009-tentang-kearsipan>
- Wardani, H. A. R., & Putra, P. (2024). Optimalisasi Penyusunan Inventaris Arsip sebagai Sarana Temu Kembali Arsip Statis di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara. *Journal of Economic and Management (JEM) Terekam Jejak*, 1(1), 1-11.
- Zikri, M. (2024). *Pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN)-Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Oleh Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).